

## **Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci**

**Adrianto<sup>1</sup>, Syamsurizaldi<sup>2</sup>, Aidinil Zetra<sup>3</sup>**

**<sup>1</sup> Staf BAPPEDA Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi**

**<sup>2&3</sup> Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Andalas**

**syamsurizaldi@gmail.com**

### **Abstract**

*This research is motivated by a significant increase in the number of tourist visits, especially foreign tourists since the establishment of Kerinci Regency as Jambi Province's tourism branding in 2016. The purpose of this study is to describe management and constraints of managing tourism destination development program by the Office of Tourism, Culture, Youth and Sports in Kerinci Regency. The theory used in this study is the management theory of George R. Terry. The method used in this study is descriptive qualitative with primary and secondary data obtained through in-depth interviews, observation, and document study. The informants were determined by purposive sampling, namely the Head of Tourism Destination Development Division of the Culture, Youth and Sports Tourism Office of Kerinci Regency then officials, staff, and other relevant parties. The results or findings of this study are that the management of the Kerinci Regency tourism destination development program has been carried out not quite well, but in the future it needs to be refined in several ways, such as planning documents, coordination, budgeting, and resource enhancement and collaboration with stakeholders to achieve results optimal.*

**Keywords:** *Development of Tourism Destination, Management Program.*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum meningkatnya secara signifikan angka kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara sejak ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai *branding* pariwisata Provinsi Jambi pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan manajemen program pengembangan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen George R. Terry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*, yakni Kepala Bidang dan Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci belum dilaksanakan dengan baik, dan masih ditemukan beberapa kendala dalam proses manajemen program. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa hal, seperti penyiapan dokumen perencanaan induk pengembangan pariwisata daerah, meningkatkan koordinasi lintas OPD dengan membentuk Tim, meningkatkan alokasi dan ketepatan penggunaan anggaran, dan peningkatan sumberdaya dan kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan destinasi pariwisata.

**Kata Kunci:** Manajemen Program, Pengembangan Destinasi Pariwisata

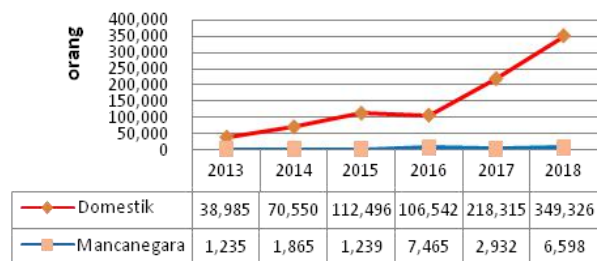
## PENDAHULUAN

Kabupaten Kerinci merupakan satu-satunya kabupaten/kota berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 920/KEP.GUB/DISBUDPAR.1/IX/2016 tentang Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kerinci sebagai *branding* pariwisata Provinsi Jambi. Penetapan ini berdasarkan kajian bahwa Kabupaten Kerinci memiliki keunggulan potensi wisata baik dari aspek kuantitas, kualitas maupun daya tarik dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Keunggulan destinasi wisata di Kabupaten Kerinci yaitu destinasi alam, dimana satu-satunya daerah yang berada di daerah dataran tinggi dan tepatnya dibawah Gunung Kerinci, yaitu gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2017 mencatat, bahwa di Provinsi Jambi terdapat 193 objek wisata alam, 98 diantaranya berada di Kabupaten Kerinci.

Namun demikian, penetapan Kabupaten Kerinci sebagai *branding* pariwisata Provinsi Jambi belum disertai dengan peningkatan kualitas

pengelolaan destinasi sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini mengakibatkan belum terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan khususnya wisatawan mancanegara. Pada akhirnya sehingga sektor pariwisata belum mampu mendorong percepatan pengembangan sektor perekonomian masyarakat dan belum berkontribusi banyak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci. Setelah tiga tahun penetapan Kabupaten Kerinci sebagai *branding* pariwisata Provinsi Jambi, data menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kerinci belum meningkat secara signifikan. Hal ini terlihat pada Gambar

Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Kerinci Tahun 2013 - 2018

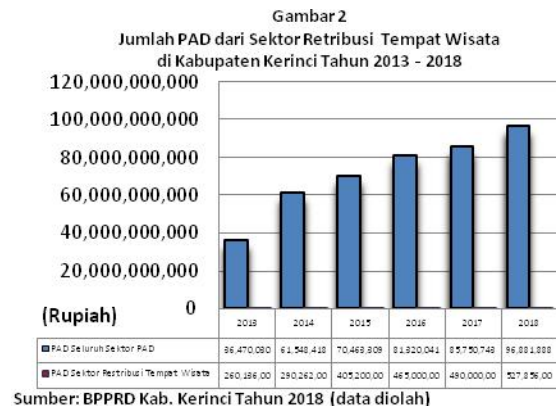


Sumber: BPS, Kerinci Dalam Angka Tahun 2018 (Data Diolah)

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kerinci dari tahun 2013 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Kenaikan secara pesat hanya terjadi pada tahun 2016 yakni mencapai 7.465 orang, ini merupakan tahun pertama ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai *branding* Pariwisata Provinsi Jambi. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan sekitar 61% kemudian pada tahun 2018 terjadi kenaikan kembali sebesar 115%. Berdasarkan analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa belum ada tren kenaikan secara berarti pada angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Kerinci sejak ditetapkannya Kabupaten Kerinci sebagai *branding* pariwisata Provinsi Jambi.

Sedikit berbeda dengan apa yang terjadi pada angka kunjungan wisatawan domestik, yakni tren kenaikan terjadi dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Pada tahun 2016 justru terjadi penurunan sebesar 5%, tetapi pada tahun 2017 kembali terjadi kenaikan sebesar 105 % dan tahun 2018 kenaikan hanya mencapai

sekitar 60 %. Artinya, pada angka kunjungan wisatawan domestik juga belum terjadi kenaikan secara signifikan. Kondisi ini mempengaruhi angka capaian PAD Kabupaten Kerinci. Berikut ini disajikan grafik data perkembangan kontribusi retribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kerinci selama lima tahun terakhir.



Berdasarkan Gambar 2, maka dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi dari sektor pariwisata terhadap PAD dari tahun 2013 sampai tahun 2018 rata-rata hanya 0,6 %. Artinya, selama hampir tiga tahun sejak diberlakukannya Kabupaten Kerinci sebagai *branding* Pariwisata Provinsi Jambi ternyata belum mampu meningkatkan secara signifikan angka kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kerinci. Sedikitnya

jumlah kunjungan wisatawan yang mengakibatkan kecilnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kerinci menunjukkan belum maksimalnya pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Kerinci, Salah satunya dipengaruhi oleh faktor manajemen pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya (M. Pratama: 2016), bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya pariwisata Kabupaten Kerinci ialah pengelolaan objek wisata yang tidak profesional dan kebijakan-kebijakan pariwisata yang tidak tepat sasaran dan tidak berkelanjutan, serta minimnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan manajemen secara baik dan terpadu dengan koordinasi dan kerjasama antara semua pihak yang turut menunjang kegiatan pariwisata. Manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (George R. Terry: 2000).

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin lebih jauh menggambarkan apa kendala manajemen program pengembangan

destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu manajemen publik, khususnya kajian tentang manajemen destinasi pariwisata oleh pemerintah daerah. Kemudian hasil penelitian ini dapat menjadi masukan pedoman bagi semua pihak terhadap Pemerintah Kabupaten Kerinci dan pihak terkait lainnya dalam mengevaluasi dan merumuskan kembali kebijakan pengelolaan destinasi pariwisata lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ialah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor J dalam Sofar Silaen, 2018:18). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*, yakni Kepala Bidang dan Staf Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci dan pihak terkait lainnya. Data

penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Keabsahan data yang didapat diuji dengan melakukan triangulasi sumber dan data dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen program pengembangan destinasi pariwisata merupakan proses pengelolaan program pengembangan daerah tujuan pariwisata. Manajemen program pengembangan destinasi pariwisata dalam penelitian ini dilihat dari empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan. Adapun lokus program pengembangan destinasi pariwisata unggulan Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa dari 98 (sembilan puluh delapan) objek/destinasi wisata Kabupaten Kerinci, hanya 4 (empat) objek/destinasi wisata yang menjadi titik fokus program pengembangan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci

tahun 2014-2019. Keempat destinasi wisata tersebut yaitu Danau Kerinci, Air Panas Semurup, Aroma Pecco, dan Air Terjun Telun Berasap.

Tabel 1. Objek Wisata Alam Unggulan Kabupaten Kerinci yang Menjadi Lokus Program Pengembangan

No.	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi/Kecamatan
1	Danau Kerinci	Bahari/Air	Danau Kerinci dan Keliling Danau
2	Air Panas Semurup	Kesehatan	Air Hangat Barat
3	Aroma Pecco	Bahari/Air	Kayu Aro Barat
4	Air Terjun Telun Berasap	Bahari/Air	Gunung Tujuh

Sumber: Dokumen Disparbudpora Kab. Kerinci Tahun 2018

Selanjutnya disampaikan hasil penelitian terkait manajemen program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci sampai tahun 2018.

### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan (Siagan, 2012: 36). Dalam hal ini, terdapat empat aspek perencanaan yaitu, penentuan visi

dan misi, perumusan kebijakan, penentuan anggaran dan penentuan target organisasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci telah melakukan perencanaan keempat aspek tersebut sesuai aturan yang berlaku, kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis yang disusun setiap lima tahun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019. Rencana Strategis tersebut selanjutnya diuraikan secara operasional dalam rencana kerja tahunan.

Pada tahapan perencanaan, bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci terkendala dengan belum adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Hal ini menyebabkan sinergisitas perencanaan program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci dengan program pembangunan sektor lainnya menjadi tidak optimal. Disamping itu, terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci untuk sektor pariwisata,

sehingga kegiatan yang dapat direncanakanpun menjadi terbatas pula. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rozidateno dkk, 2015) bahwa sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan daerah di Indonesia. Hal itu juga ditemukan dalam pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Kerinci, dimana alokasi anggaran tidak sebagaimana yang direncanakan, baik yang ada pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga maupun OPD lainnya, Sebagaimana hasil wawancara dan studi dokumentasi, dalam upaya mewujudkan visi "Terwujudnya Kerinci sebagai daerah tujuan wisata yang unggul berdaya saing, berkelanjutan dan berbasis kekayaan alam dan budaya menuju Kerinci lebih baik" hanya didukung oleh rata-rata tiga jenis kegiatan untuk program pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Kerinci per tahun. Adapun kegiatan tersebut meliputi: *pertama*, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, *kedua*, peningkatan pelayanan teknis pariwisata di tiga UPTD, dan *ketiga*, pengadaan fasilitas Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). Disamping itu, kendala lainnya ialah belum adanya

kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dengan pihak Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dalam pengelolaan objek wisata, padahal hampir separuh objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci berada dalam kawasan TNKS dan semuanya berpotensi untuk dikembangkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aspek perencanaan, perlu dilakukan penyempurnaan dengan melibatkan semua pihak terakait terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak swasta, TNKS dan masyarakat sekitar lokasi wisata. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rozidateno (2016) dan lebih spesifik hasil penelitian Mardianis (2018), yang menyebutkan bahwa dalam perencanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Kerinci harus melibatkan seluruh *stakeholder* dan fokus pada peningkatan keunikan tertentu untuk meningkatkan daya tarik sehingga memiliki spesialisasi tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jambi.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang,

sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Hasibuan, 2001: 23). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengorganisasian yang dilakukan bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci menggunakan garis organisasi dan instruksi. Pengaturan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci dan masing-masing unit telah memahami tugas dan fungsi masing-masing. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata merupakan satu diantara lima bidang di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci yang bertanggungjawab terhadap program pengembangan destinasi pariwisata. Bidang tersebut terdiri dari satu orang kepala bidang eselon III a dan tiga orang kepala seksi eselon IV a serta terdiri dari empat orang staf. Berikut ini disajikan tabel jumlah pegawai Dinas Pariwisata,

Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kerinci secara keseluruhan  
berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kerinci Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Pendidikan Pariwisata	Pendidikan Non Pariwisata	Jumlah
1	S.2	1	11	12
2	S.1	0	27	27
3	D. III	2	0	2
4	SMU/Sederajat	0	6	6
5	SMP/Sederajat	0	2	2
6	SD/Sederajat	0	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>47</b>	<b>50</b>

Sumber: Dokumen Disparbudpora Kab. Kerinci Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci memiliki pegawai yang sebagian besar (78%), memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan S2. Sedangkan 22% memiliki kualifikasi pendidikan SLTA ke bawah. Namun demikian, dari 50 (lima puluh) orang pegawai hanya 1 (satu) orang atau 2% yang berlatar belakang pendidikan kepariwisataan yaitu lulusan diploma tiga (D3). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bidang pengembangan destinasi pariwisata sendiri mengalami keterbatasan sumber daya manusia, karena hanya satu orang yang berlatar belakang pendidikan kepariwisataan. Hal

ini menyebabkan pembagian beban tugas yang diterima para pegawai terkadang belum sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sehingga kinerja aparatur belum terwujud sebagaimana yang diharapkan. Peningkatan kemampuan pegawai selama ini dilakukan melalui pelatihan, walaupun intensitas pelaksanaannya masih terbatas untuk aparatur yang ada. Kendala lainnya, sampai saat ini belum terbentuk tim koordinasi pengembangan pariwisata lintas OPD, sehingga terkesan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga saja, karena peran OPD lain



belum optimal. Keberadaan Tim ini, dianggap sangat penting sebagai wadah koordinasi lintas sektor, akan tetapi penetapannya secara formal belum terlaksanakan.

### 3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama diantara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Syamsi, 1998: 96). Setelah pembagian tugas dan fungsi masing-masing staf, kemudian para staf melaksanakannya sesuai dengan instruksi pimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keempat objek wisata unggulan khususnya dalam hal kegiatan pelayanan dilakukan oleh unit pelaksana teknis dinas pada masing-masing lokasi sesuai dengan petunjuk kepala dinas. Sementara itu, untuk kegiatan lainnya seperti peningkatan sarana dan prasarana pariwisata dan pengembangan kelompok sadar wisata atau kelompok sejenis lainnya dilakukan oleh unit yang ada di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Semua kegiatan pada program Pengembangan Destinasi

Pariwisata telah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat pada keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan yang telah disusun dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Pada fungsi manajemen penggerakan, terdapat kendala yaitu belum tersedianya anggaran di APBD termasuk belum adanya dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jambi dan APBN yang secara khusus untuk pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Kerinci. Kemudian fakta lain yang terjadi adalah masih kurang keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata. Sementara sesuai dengan perkembangan studi-studi manajemen publik saat ini, kolaborasi dalam pengelolaan sektor publik, termasuk sektor pariwisata sangatlah diperlukan. Kolaborasi menurut Rozidateno (2017) adalah kerjasama dan hubungan antar organisasi yang disepakati bersama-sama melalui proses komunikasi. Sementara Benton (2013; 220) menyatakan bahwa kolaborasi dalam penyediaan layanan publik yang melibatkan dua atau lebih tingkatan pemerintahan (nasional, regional, daerah

dan lokal) tidak jarang terjadi kolaborasi harus dilakukan dengan berbagai cara atau strategis. Kurangnya keterlibatan lintas sektor ini dapat terlihat pada ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata lainnya yang belum optimal, sehingga beberapa kebutuhan pengunjung belum dapat terpenuhi dengan baik. Sebagaimana hasil penelitian M. Pratama (2016), dijelaskan bahwa faktor yang paling mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kerinci adalah terbatasnya fasilitas pelayanan wisata seperti sanitasi, jaringan listrik, komunikasi, fasilitas perbankan, olahraga, akomodasi serta ditambah pula dengan kurangnya perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada. Disamping itu, akses jalan menuju objek wisata yang masih belum memadai sehingga wisatawan untuk mencapai objek wisata membutuhkan waktu tempuh yang relatif lama. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh belum maksimalnya dukungan pemerintah, pihak swasta, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengembangan destinasi wisata unggulan.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan (Handyaningrat, 2007: 26). Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci terhadap program yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya telah dijalankan sesuai dengan ketentuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rapat evaluasi rutin internal minimal per-triwulan dan kegiatan monitoring dan evaluasi lainnya dengan tetap mempedomani aturan dan ketentuan yang ada. Hasil pengawasan dan pengendalian tersebut terangkum pula dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

dan dokumen evaluasi terkait lainnya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kerinci oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci telah belum terlaksana dengan baik dan masih menghadapi beberapa kendala dari aspek perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa aspek manajemen program untuk meningkatkan daya tarik dan tingkat kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Kabupaten Kerinci yang telah ditetapkan sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi.

Saran yang dapat dikemukakan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

a) Menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah sebagai dokumen perencanaan strategis yang mengikat dan dipedomani oleh

semua stakeholder dalam pengembangan sektor pariwisata termasuk dalam pengembangan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Kerinci.

- b) Menjalin kerja sama dengan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dalam pemanfaatan objek wisata yang berada berada dalam kawasan TNKS.
- c) Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Pariwisata Daerah yang beranggotakan lintas Organisasi Perangkat Daerah, unsur swasta dan masyarakat.
- d) Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam hal investasi dan kerjasama dengan masyarakat serta stakeholder lainnya yang diawali dengan penyederhanaan mekanisme dan izin usaha.
- e) Meningkatkan upaya sumber dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat seperti melalui Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus. Anggaran ini agar diprioritaskan untuk meningkatkan ketersediaan

- fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata (amenitas wisata), dan prasarana pendukung pariwisata.
- f) Merekrut aparatur yang berlatar belakang Pendidikan kepariwisataan dan meningkatkan Sumber Daya Aparatur.
- g) Menggiatkan sosialisasi dan pembinaan kelompok sadar wisata dan kelompok sejenis lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2017. Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2017.
- Badan Pusat Statistik, 2018. Kabupaten Kerinci Dalam Angka Tahun 2018.
- Benton, J. Edwin (2013), *Local Government Collaboration: Considerations, Issues, and Prospects*. State and Local Government Review 45(4) 220-223.
- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. Dokumentasi Tahun 2019.
- Handyaningrat, Soewarno, 2007. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta Bina Aksara.
- Hasibuan, 2001. *Manajemen Dasar, Pengetian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardianis, 2018. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol.09. No.1 hal.53-65
- M. Pratama, 2016. Kajian Penurunan Pariwisata di Dataran Tinggi Kerinci, Provinsi Jambi. *Jurnal Teknik Perencanaan wilayah Kota*. Vol. 5. No.1 hal. 40
- Rozidateno, Putri Hanida, Bimbi Irawan dan Syamsurizaldi (2015), *The Analysis of Planning and Budgeting Policy for Making More Significant Local Government Planning Policy in Indonesia*. IJASOS-International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. I, Issue 2, August 2015.pp 287-293.
- Rozidateno, Putri Hanida (2016), *Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman*. Jurnal Penelitian Politik, Vol.7 No. 1. Pp. 71-84.
- Rozidateno, Putri Hanida, Bimbi Irawan, Syamsurizaldi, Wewen Kusumi Rahayu (2017), *Collaboration of Stakeholders In Formation and Development Nagari-Owned Enterprise*. Policy & Governance Review Volume 1, Issue 3, 213-227.
- Silaen, Sofar, 2018. *Metodologi Penelitian Sosial untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: In Media.
- Sondang, Siagan, 2012. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsi, Ibnu, 1998. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*: Jakarta: Bina Aksara.

Terry, George R, 2000. *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.